

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA *BAITUL MAAL*
WA TAMWIL (BMT) PRIMA DI LUBUK SEBERUK OGAN KOMERING**

ILIR



OLEH:

Ma'rifatul Aisyah

NIM: 12190115

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sajana
Ekonomi Islam (S.E)**

PALEMBANG

2017



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E. 4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Ma'rifatul Aisyah
NIM/Program Studi : 12190115/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Prima* di Lubuk Seberuk Ogan Komering Ilir

Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal, 22 November 2017

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Tanggal pembimbing utama : Dedy Anwar, SE.,M.Si

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Syamsiar Zahrani, M.A

t.t :

Tanggal Penguji utama : Eti Yusnita, S.Ag.M.H.I

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Lidia Desiana, SE,M.Si

t.t :

Tanggal Ketua : Drs. Sunaryo.,M.H.I

t.t :

Tanggal Sekretaris : RA. Ritawati, S.,M.H.I

t.t :



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Prima* di Lubuk Seberuk Ogan Komering Ilir

Ditulis Oleh : Ma'rifatul Aisyah

NIM : 12190115

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 22 November 2017

Dekan,



Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ma'rifatul Aisyah

Nim : 12190115

Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dengan Judul "Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada BMT Prima di Lubuk Seberuk OKI" kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang November 2017

Saya yang menyatakan



Ma'rifatul Aisyah

Nim : 121910115



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi untuk Diuji

Kepada Yth,
Ketua Prodi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr-Wb.

Setelah disetujui judul dan permasalahan skripsi Mahasiswa :

Nama : Ma'rifatul Aisyah

Nim/Program Studi : 12190115/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada BMT Prima di
Lubuk Seberuk OKI

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian
komprehensif dan munaqosyah.
Demikian pemberitahuan dari kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Utama

Dekv Anwar, SE. M.Si

NIP.198207152008011015

Pembimbing Kedua

Svamsiar Zahrani, M.A

NIP. 197011142014111001

MOTTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
(al-baqarah 216)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dari hati yang paling dalam. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- *Ayahandaku (Ruslan) dan Ibundaku (Munjihayati) tercinta yang selalu memberikan do'a dan restunya demi keberhasilan, dan kebahagiaanku*
- *Adik-adiku tersayang (Ma'rifatus Sholichah dan Naufal Ma'ruf Firmansyah)*
- *Kakek dan Nenek tersayang serta, keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu*
- *Sahabat-sahabatku FK I 3 yang selalu membantu dan mendukung*
- *Mahasiswa FK I angkatan 2012*
- *Almamater yang aku banggakan*

ABSTRAK

Standar akutansi adalah pedoman pokok dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan. Standar akutansi yang merupakan pernyataan-pernyataan tersebut dikodifikasikan dalam buku yang berjudul Standar Akutansi Keuangan (SAK). Buku tersebut berisi kumpulan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK). Dalam menyusun laporan keuangan, BMT dapat menggunakan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI), yaitu PSAK No. 27, Akutansi Perkoperasian, PSAK No.31, Akutansi Perbankan, PSAK No. 59 dan PSAK No.101. Untuk mempetanggungjawabkan kegiatan usaha BMT dalam periode tertentu, pihak manajemen akan membuat laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

BMT Prima selaku lembaga keuangan syariah, menyajikan laporan keuangan dengan engacu pada PSAK No. 27, dikarenakan berbadan hukum koperasi. Namun dalam operasionalnya memakai bisnis keuangan syariah, maka laporan keuangannya juga mengacu pada PSAK No. 101 atau Kontrak Syariah. Untuk mengetahui bagaimana BMT Prima mengimplementasikan laporan keuangan berdasarkan fungsi BMT sebagai Lembaga Keuangan dan Lembaga Ekonomi maka penyusun melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu membandingkan laporan keuangan yang disajikan oleh BMT dengan laporan keuangan yang berlaku secara umum berdasarkan peraturan-peraturan yang baru tentang Standar Akutansi Keuangan, seperti membandingkan antara Laporan Keuangan BMT, PSAK No. 27 tentang akutansi perkoperasian dan PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Prima belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 27 dikarenakan pada laporan keuangan BMT Prima hanya menyajikan komponen Neraca dan Laporan laba/rugi, sedangkan pada Standar PSAK No. 27 terdiri dari 4 komponen yaitu neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan untuk standar PSAK 101, BMT belum menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang menjadi komponen penting dalam laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah.

Kata kunci : Penyajian laporan Keuangan, BMT (*baitul maal wa tamwil*)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada BMT Prima di Lubuk Seberuk OKI” dapat terselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, arahan, saran, dorongan serta kritik dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahandaku Ruslam, dan Ibunda Muji Hayati tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan baik itu moril maupun materil yang tiada henti-hentinya selama masa perkuliahan sehingga membuat penulis termotivasi. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian
2. Adik-adiku tersayang Ma'rifatus sholichah, dan Naufal Ma'ruf Firmansyah, serta saudara-saudaraku dan keluargaku (kakek, nenek, dan paman, bibi, semuanya) yang selalu memberikan semangat dan dukungannya
3. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Qodariah Barkah, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu TitinTitin Hartini, SE. M.Si, selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam dan Ibu Mismiwati, SE., MP, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam.
7. Bapak Prof. DR. H. Suyitno M.Ag selaku Penasehat Akademik

8. Bapak Deky Anwar, SE, M.S.I selaku pembimbing utama yang telah membantu dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Bapak Syamsiar M,A selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis hingga selesainya skripsi ini
10. Sahabat dan teman seperjuangan EKI angkatan 2012 khususnya EKI 3, telah menjadi sahabat yang menjadi dorongan tersendiri bagi penulis
11. Kepada pihak BMT Prima Lubuk Seberuk OKI, khususnya ketua BMT Prima bapak Muhammad Kurniadi S.P, bapak Hariyanto, dan bapak Muhammad Khoiri beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian
12. Semoga apa yang diberikan kepada penulis, menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Selain dari itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu mengampuni dan memberikan petunjuk serta rahmat-Nya. Amin ya Robbal'Alamiin.

Palembang, November 2017

Penulis

Ma'rifatul Aisyah

NIM : 12190115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DANPERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYTAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoristik.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
1. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
2. Jenis dan Sumber Data.....	23
3. Fokus Penelitian.....	24
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	24
a. Metode Wawancara (interview).....	24
b. Dokumentasi.....	25
c. Teknik Analisis Data.....	25
H. Sistematika Laporan.....	26

BAB II LAPORAN KEUANGAN

A. Definisi Laporan Keuangan.....	27
B. Tujuan Laporan Keuangan.....	28
C. Laporan Keuangan Koperasi.....	31
D. Laporan Keuangan Bank Syariah.....	33
E. Laporan keuangan BMT.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM BMT PRIMA

A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya BMT Prima.....	42
B. Struktur Organisasi BMT Prima.....	44
C. Visi dan Misi BMT Prima.....	48
D. Produk dan Jasa BMT Prima.....	548

BAB IV ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BMT PRIMA

A. Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Lembaga Keuangan (PSAK No.27).....	54
B. Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Lembaga Ekonomi (Kontrak Syariah PSAK 101-110).....	59
C. Laporan Keuangan BMT Prima.....	69
D. Perbedaan penyajian laporan keuangan BMT Prima dengan Bank Syariah.....	73
E. Analisis Kualitatif.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Perbedaan penyajian laporan keuangan BMT dan Bank Syariah.....	75
Tabel 4.2 Persamaan Penyajian Aktiva BMT dan Aktiva Perbankan Syariah.....	76
Tabel 4.3 Persamaan Penyajian Pativa BMT dan Aktiva Perbankan Syariah.....	77
Tabel 4.4 Perbandingan laporan laba rugi BMT dan Laporan Laba Rugi Bank Syariah.....	79
Tabel 4.5 Perbandingan laporan Arus Kas BMT dan Laporan Arus Kas Bank Syariah.....	82
Tabel 4.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat BMT dan Bank Syariah.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Prima.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kesuksesan sistem syariah terutama dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Indonesia juga merupakan negara dimana terus bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, tidak hanya berpusat pada bank. Semakin lengkapnya elemen lembaga keuangan syariah ditandai juga dengan kemunculan *baitul maal waat tamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah yang bermunculan telah memberikan perhatian lebih dari berbagai pihak terhadap lembaga keuangan syariah. Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah pun mutlak diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isnya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan amanahnya.¹

BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, jadi peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi

¹Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana prenada media group : jakarta, 2017) hlm 473

dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dimana KJKS dan UJKS melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.² Seiring dengan melaju kencangnya praktik akuntansi syariah yang dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kearah tren yang membanggakan, sangat penting rasanya ada aturan-aturan baku yang diterima secara umum.

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan formal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dibawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

BMT yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UULKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izinusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat 8 Januari 2016. Bentuk badan

²Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2 /per/M.KUKM/X/2007 Tentang : Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syarih Koperasi (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007), hlm 81

hukum BMT umumnya berbentuk koperasi dimana AD/ART disahkan oleh menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Di Indonesia, pedoman untuk praktik akuntansi perbankan syariah merujuk pada PSAK 59 yang selanjutnya mengalami perubahan dengan ditetapkannya beberapa standar akuntansi syariah seperti PSAK 101s/d110 sehingga PSAK 59 dinyatakan tidak berlaku lagi. Standar akuntansi tersebut dibuat berbasis kontrak syariah di antaranya PSAK 102 (mengatur tentang akuntansi akad murabahah), PSAK 103 (tentang akuntansi dan akad salam), PSAK 104 (tentang akuntansi dan akad isthisna'), PSAK 105 (tentang akuntansi atas akad mudharabah), PSAK 106 (tentang akad akuntansi akad musyarakah), PSAK 107 (tentang akuntansi akad ijarah).³ Lembaga keuangan syariah beberapa waktu ini terbukti banyak telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya.

Di dalam nama *Baitul Maal Wat Tamwil* terdapat 2 istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Baitul Maal lebih memfokuskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana nonprofit(zakat, infak, dan sedekah), adapun untuk Baitul Tamwil lebih berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana komersial. Dari penggabungan keduanya, BMT mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ganda, BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan (KJKS).⁴

³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*(Indeks:Jakarta, 2017) hlm 179

⁴*Ibid*hlm 17

Hal inilah yang membuat banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan permodalan usaha, simpan, pinjam, dan penyaluran zakat. Baitul maal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul maal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat miskin dan lemah yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain.

Mulai diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya termasuk didalamnya baitul maal di masyarakat, sudah pasti lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja lembaganya terkait masalah ini. Dalam hal ini yang memegang peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan inilah yang kemudian akan menjadi bahan informasi bagi pemakainya, laporan keuangan yang berisi berbagai informasi tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu keputusan. Baitul mal dalam hal ini berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya.

Baitul maal sendiri merupakan lembaga pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Tentunya

masyarakat juga berhak mendapatkan laporan yang benar dan memadai karena masyarakat juga salah satu pemakai laporan keuangan. Sebagaimana diterangkan, pengguna laporan keuangan baitul maal meliputi pemerintah, akuntan publik, dan masyarakat. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya.

Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan kinerja baitul maal. Adapun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan baitul mal sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis, dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon penyeter dana, seluruh BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT dapat berkembang dari kelompok swadaya masyarakat.⁵

BMT Prima merupakan salah satu dari sekian banyak BMT yang ada. Seperti disebutkan di atas, bahwa BMT saat ini diarahkan untuk berbadan hukum Koperasi, BMT Prima juga berbadan hukum koperasi dan laporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 27 (akuntansi perkoperasian). Namun karena dalam operasionalnya memakai pencatatan dan pelaporan tambahan bisnis keuangan syariah, dalam praktek pembiayaan secara tidak langsung BMT Prima juga menggunakan kontrak syariah (akuntansi perbankan syariah). Terkait hal itu, ada pertanyaan, bagaimana penyusunan laporan keuangan BMT Prima, apakah

⁵A Djayuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187

penyusunan laporan keuangan BMT Prima telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum.

Kehadiran BMT Prima bukanlah hal yang baru, dimulai dengan cara penerapan yang tradisional sampai ke tahap pengelolaan melalui sebuah lembaga pengelolaan keuangan yang modern. BMT Prima merupakan salah satu lembaga penghimpun dana ZIS yang bernaung di dalam tataran pemerintahan daerah. Masuknya lembaga pengelola dana ZIS ini ke tataran pemerintahan membuat pengelolaan baitul maal juga mengikutsertakan pemerintah didalamnya.. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada BMT Prima Lubuk seberuk OKI”**

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang menjadi bahasan utama adalah:

1. Bagaimanakah implementasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi?
2. Bagaimanakah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum ?

K. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi ?

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum ?

L. Manfaat

1. Bagi Akademisi

Sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan di BMT.

2. Manfaat praktis

Untuk manfaat praktis dari penulisan skripsi ini dapat menjadi acuan bagi para anggota BMT Prima dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi laporan keuangan sehingga dapat menjadi pusat perekonomian rakyat yang berkembang.

M. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini tidaklah sama sekali baru. Dalam kajian pustaka ini, penulis mendeskripsikan berbagai karya yang ada keterkaitannya dengan judul skripsi ”Analisis penyajian laporan keuangan pada BMT Prima Lubuk Seberuk OKI” Antara lain

Amdayani, Melda (2008) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP pada BPR di Kota Padan, tesis pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP. Penelitian ini membuktikan bahwa BPR yang menjadi sampel penelitian belum menerapkan PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan. BPR juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.

8/7/PBI/2006 tanggal 23 Februari 2006 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. BPR juga belum melakukan pemisahan pencatatan antara tanah dan bangunan. Padahal kedua akun tersebut memiliki nilai nominal masing-masing.⁶

Yanti, Suheria Yanti (2015) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau), skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau terdapat beberapa permasalahan antara lain: Laporan keuangan yang disajikan pada laporan tahunan hanya laporan keuangan yang sederhana saja, banyak saldo dana yang dilaporkan yang tidak sesuai yaitu antara penerimaan/penyaluran dengan rekapitulasi penerimaan/rekapitulasi penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, dan tidak mencatat penyaluran dana untuk *gharim* dan *amil*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Riau belum sesuai dengan PSAK 109. Diketahui bahwa saldo dana yang tidak sesuai disebabkan karena kesalahan dalam mencatat laporan keuangan.⁷

⁶Amdayani, Melda “ Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP pada BPR di Kota Padang”. thesis, Fakultas Ekonomi. 2008, (<http://repository.unand.ac.id/id/eprint/13871>), diakses tanggal 30 juli 2017

⁷Suheria Yanti “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau), 2015, (<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/>), diakses 30 juli 2017

Bustamam, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra (2015)“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh” Berdasarkan pembahasan hasil penelitian Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan menggunakan basis akuntansi kas (cash basis). Laporan Arus kas disusun menggunakan metode langsung dan dikelompokka berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh staf akuntan Baitul Mal Aceh pada setiap periode yang berakhir 31 Desember setiap tahunnya. Secara keseluruhan pihak Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Tidak adanya pos Dana Amil pada Laporan posisi keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya.
- b. Tidak disajikannya Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dikarenakan sampai saat ini Baitul Mal Provinsi Aceh belum memiliki aset kelolaan.⁸

R.Sanjaya Silalahi (2015) “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak sesuai dengan PSAK 101, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru mengacu pada PSAK 59, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan karena

⁸Bustamam, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh, skripsi Universitas Syiah Kuala, 2015

pihak – pihak yang berkepentingan terhadap BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru hanya membutuhkan laporan neraca dan laba rugi. Sehingga Laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dana kebajikan tidak disajikan oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.⁹

Setiady (2012) dengan judul Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden UMKM yang ada di Pusat Grosir Surabaya telah siap mengimplementasikan SAK ETAP dan sebagian besar lainnya tidak siap mengimplementasikan SAK ETAP. UMKM yang terkategori sebagai UMKM yang tidak siap mengimplementasikan SAK ETAP adalah UMKM yang menyatakan diri tidak bersedia mengimplementasikan SAK ETAP karena umumnya pencatatan dan pembuatan laporan keuangan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan alasan bahwa akuntansi itu sulit dan rumit serta tidak tersedianya cukup waktu dan SDM yang memadai untuk melakukan pencatatan akuntansi dan membuat laporan keuangan.¹⁰

Ariantini (2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan sisa

⁹R.Sanjaya Silalahi “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru”. *Skripsi Riau* : UIN Sultan Syarif Kasim, 2015. Hlm i

¹⁰Setiady, Marr. Telaah Kesiapan Dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen Dipusat Grosir Suarabaya. *Jurnal Berkala Ilmia Mahasiswa Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala*. <http://journal.wima.ac.id/> diakses 10 agustus 2017. Hal.79-83.

hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri karena adanya biaya yang tidak tercatat.¹¹

Pratiwi (2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.¹²

Singal (2015) dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multiguna Abadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.¹³

Nabilah (2015) Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah (studi kasus pada bmt muda dan kjks bmt amanah ummah di Surabaya). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang sesuai penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk

¹¹Ariantini, Ni Luh Gede. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, <http://ejournal.undiksha.ac.id/> diakses 8 Februari 2015.

¹²Pratiwi, Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Suisan Manado. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://www.ejournalunsrat.ac.id> diakses 9 Februari 2016. Hal.254-265.

¹³Singal, R.A, Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multiguna Abadi. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://www.ejournalunsrat.ac.id> diakses 9 Februari 2017. Hal.395-403.

koperasisyariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementrian koperasi.¹⁴

Muzayyidatul Habibah(2016)“ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati” Hasil penelitian mengidentifikasi kasikan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.¹⁵

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama/ Judul Skripsi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Amdayani, Melda (2008) dengan judul Analisis Penyajian	Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan penyajian	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu system yang di

¹⁴Nabilah Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah(studi kasus pada bmt muda dan kjks bmt amanah ummah di surabaya Universita Airlangga Surabaya <http://www.ejournalunair.ac.id> diakses 9 februari 2017 Hal 854

¹⁵Muzayyidatul Habibah (2016) “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah journal <http://www.stainkudus.ac.id> diakses pada 09 februari 2017 hlm 115

	Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP pada BPR di Kota Padang	laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 31 dan SAKETAP. Penelitian ini membuktikan bahwa BPR yang menjadi sampel penelitian belum menerapkan PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan. BPR juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tanggal 23 Februari 2006 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Perkreditan Rakyat.	yaitu laporan keuangan yang menjadi tujuan dalam penelitian pada lembaga keuangan	gunakan menggunakan PSAK no 31 dan SAK ETAP sedangkan penulis menggunakan system PSAK 59 (Perbankan syariah) dan PSAK no 27
2	Yanti, Suheria Yanti (2015) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau)	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Riau belum sesuai dengan PSAK 109. Diketahui bahwa saldo dana yang tidak sesuai disebabkan karena kesalahan dalam mencatat laporan keuangan.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada penyajian laporan keuangan yang menggunakan PSAK	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada lembaga keuangan yang di teliti serta PSAK yang di gunakan menggunakan PSAK 109
3	Bustamam, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra (2015) "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh	Secara keseluruhan pihak Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai di antaranya : a. Tidak adanya pos Dana Amil pada Laporan posisi keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya.	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada lembaga keuangan yang di teliti (BMT)	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada system PSAK yang di gunakan menggunakan PSAK 109

		b. Tidak disajikannya Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dikarenakan sampai saat ini Baitul Mal Provinsi Aceh belum memiliki aset kelolaan.		
4	Nabilah (2015) Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah(studi kasus pada bmt muda dan kjks bmt amanah ummah di surabaya.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang sesuai penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi	Persamaan pada penelitian ini adalah lembaga keuangan yang menjadi objek	Perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada PSAK yang di gunakan untuk mengukur laporan penyajian keuangannya
5	R.Sanjaya Silalahi (2015) “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekan baru	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak sesuai dengan PSAK 101, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru mengacu pada PSAK 59, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini ialah hasil dari penelitian menyatakan bahwa laporan keuangan mengacu pada PSAK 59	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sistem PSAK yang di gunakan
6	Setiady (2012) dengan judul Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden UMKM yang ada di Pusat Grosir Surabaya telah siap mengimplementasikan SAK ETAP dan sebagian besar lainnya tidak siap	Persamaan pada penelitian ini terletak pada laporan keuangan pada suatu lembaga keuangan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu system yang digukan menggunakan SAK ETAP

		mengimplementasikan SAK ETAP		
7	Ariantini (2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri karena adanya biaya yang tidak tercatat	Persamaan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pada suatu lembaga keuangan masyarakat	Perbedaan pada penelitian yaitu system yang digunakan menggunakan SAK ETAP
8	Pratiwi (2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada penyajian laporan keuangan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada system yang digunakan dan objek penelitian yang dilakukan pada suatu perusahaan
9	Singal (2015) dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multiguna Abadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan	Persamaan pada penelitian ini terletak pada laporan keuangannya	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada system yang digunakan menggunakan SAK ETAP dan penelitian dilakukan pada suatu perusahaan.
10	Muzayyidatul Habibah (2016) “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati”	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.	Persamaan pada penelitian ini yaitu adalah tempat penelitian yang dilakukan pada lembaga keuangan dengan menggunakan PSAK	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada pembiayaan murabahah jika pada penelitian penulis lebih membahas laporan keuangan bukan hanya pembiayaan murabahah

N. Kerangka Teoritik

Akutansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian-kejadian ekonomi tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi¹⁶.

Akutansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akutansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai islami, yang dibangun menggunakan epistemologi islam, prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang holistik mencakup keseluruhan kehidupan manusia yang saling terkait dalam dimensi mikro dan makro¹⁷

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi dari akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan. Sedangkan definisi akuntansi syariah menurut Sri Haryati dan Wasilah, akuntansi syariah dapat diartikan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan

¹⁶ Andrey Hasiholan Pulungan, Ahmad Basid Hasibuan, Luciana Haryono, *Akutansi Keuangan Dasar”Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012”* (Mitra Wacana Media : Jakarta, 2013) hlm 1

¹⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi” Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah”* (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2015) hlm 37

aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁸Dari beberapa definisi diatas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Akutansi syariah sesungguhnya merupakan fenomena praktik akuntansi yang berkembang dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat islam sebagai instrumen menerapkan prinsip syariah dalam dunia perbankan, seiring dengan semakin banyaknya lembaga perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah semakin luas dan berkembang. Akutansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan syariat islam.

Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Dari suatu laporan akuntansi, kita dapat melihat perubahan keuangan perusahaan yang terjadi di perusahaan, entah itu rugi ataupun untung. Akuntansi sangat identik dengan perhitungan atau keluar masuknya uang di suatu perusahaan. Jadi seseorang akuntan harus bisa memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

¹⁸Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia* (Salemba empat :Jakarta, 2017) hlm 1

Suatu laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis tren sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di perbankan syariah, sehingga diharapkan mampu untuk memprediksi apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Agar tujuan penyusunan laporan dapat tercapai, yaitu dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, beberapa lembaga diantaranya adalah IASB, telah menyusun kriteria yang dikenal dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Hal ini berarti bahwa penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, dapat menjadikan laporan keuangan tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan akan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan jika memenuhi karakteristik informasi keuangan yaitu meliputi relevansi, penyajian jujur, dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dapat diverifikasi dan dapat dipahami¹⁹

Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih lanjut keyakinan bahwa perusahaan di prediksikan akan mampu tumbuh dan memperoleh profitabilitas secara *sustainable*, yang otomatis tentunya pihak-pihak

¹⁹ Wiiwin Yadiati, Abdulloh Mubarak, *Kualitas Pelaporan Keuangan"Kajian Teoritis dan Empiris"*(Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2017) hlm, 6

yang berhubungan dengan perusahaan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan.

Laporan akuntansi juga berfungsi bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk ke depannya agar perusahaan tersebut terus mendapatkan untung yang besar. Adapun siklus akuntansi ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyimpanan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan dari lembaga perusahaan dan lembaga lainnya dimana aktivitasnya berhubungan dengan produksi, pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, atau berhubungan dengan pengolahan data-data.

Dalam prosesnya, akuntansi sendiri memiliki tahapan dalam kegiatan akuntansi tersebut, dan dalam prosesnya, siklus akuntansi memiliki dua sistem akuntansi yakni: Sistem Akuntansi Manual dan Sistem akuntansi komputer. Adapun landasan akuntansi syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran Q.S An Nahl (16) ayat 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءَ الْوَجْهِ الْعَبْثِيِّ يَعْظُمُ لِعَظْمِ تَذَكُّرُونَ ۚ﴾²⁰

²⁰90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya, bahkan keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menepatkan sesuatu sesuai posisinya, sedangkan lawan dari keadilan adalah kedzaliman.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi akuntansi utama yang tersedia bagi pihak di luar perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai apa yang telah diraih oleh perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut para investor dan kreditor dapat menganalisa dan mengevaluasi kondisi serta kinerja keuangan yang bersangkutan. Menurut standar akuntansi keuangan koperasi laporan keuangan terdiri dari

1. Neraca,
2. Laporan Perhitungann Sisa hasil Usaha,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota serta
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan akuntansi perbankan syariah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang dikhususkan sebagai alat bantu perbankan syariah yang lengkap meliputi :²¹keuangan bank syariah yaitu:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Perubahan Ekuitas,
5. Laporan Perubahan dana Investasi,
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta
7. Laporan Sumber dan Pengguna dana Qardun Hasan.

²¹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berdasarka PSAK Syariah*, hlm 161

8. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan BMT terdiri dari²²

1. Neraca .
2. Laporan Laba/Rugi ,
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan qardh al Hasan

O. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penyajian laporan keuangan BMT Prima, apakah penyajian laporan keuangan yang diterapkan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum serta sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi dengan cara membandingkan laporan-laporan keuangan BMT Prima dengan PSAK Syariah (akuntansi perbankan syariah).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kualitatif yaitu, dengan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang dihasilkan dari orang yang diamati. Lexy J Meleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang, perilaku orang yang dapat diamati secara langsung.²³ Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi

²² Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil* "Sebuah Kajian Teoritis" (Penerbit Amzah: Jakarta, 2016) hlm, 173

²³ Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2010) hlm 102

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan atau memuat laporan penelitian secara mendetail.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung, dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer adalah laporan keuangan di BMT Prima di Lubuk Seberuk .

3. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada penyajian laporan keuangan di BMT Prima, apakah penyajian laporan keuangan di BMT Prima telah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mengacu pada PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian atau sebagai lembaga ekonomi yang mengacu pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, serta peran manajer dan staf karyawan dalam mengelola laporan keuangan secara syari'ah.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang langsung dilakukan pada responden. Oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

d. Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan sambil bertatap muka antara penanya, penjawab, dan koresponden. Metode interview atau wawancara yaitu suatu proses tanya jawab lisan, dua orang

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dalam menggunakan metode ini bisa menggunakan panduan wawancara yang telah disediakan pedoman wawancara sebelumnya dan kadang kala tidak menggunakan pedoman wawancara akan tetapi wawancara secara terbuka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan umum di BMT Prima Lubuk Seberuk.

e. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya, dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, atau surat kabar dan sebagainya.²⁵ Adapun yang penulis gunakan sebagai referensi adalah arsip-arsip ataupun data yang ada di BMT Prima Lubuk Seberuk OKI.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar singkat sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lexy J. Meleong di dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁶

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 35

²⁵Margono. *Metologi penelitian Pendidikan Komponen MKDK*.(jakarta; PT. Rineka Cipta, 2007) hlm 202

²⁶Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 21

P. Sistematika Laporan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I : Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, teoritik penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Bagian ini penulis akan menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan laporan keuangan dalam koridor Islam.

Bab III : Pada bagian ini penulis akan menjelaskan deskripsi objek penelitian, yang berisi tentang tempat penelitian, deskriptif objek penelitian, deskriptif geografis, deskripsi demografis dan lain-lain.

Bab IV : pada bab ke empat ini terdiri dari analisis terhadap objek penelitian, bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang diteliti.

Bab V : Penutup merupakan bagian terakhir penulisan skripsi, Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

F. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Sofyan Assauri, laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya, ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Farid Harianto yakni laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan, pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan²⁷.

Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data (informasi) yang terdapat pada laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.²⁸ Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan

²⁷ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Alfabeta: Bandung, 2012) hlm 2

²⁸ Najmudin. *Manajemen Keuangan dan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern* (Yogyakarta; Andi, 2011) hlm 64

diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

Dari penjelasan diatas laporan keuangan dapat kita artikan sebagai laporan yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas atau perusahaan agar dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

G. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut kondisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Andrey, Ahmad, Luciana, laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan besar ekonomi.²⁹ Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggung jawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.³⁰ Disamping itu, terdapat beberapa tujuan lain dari laporan keuangan, diantaranya meliputi :³¹

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usaha.

²⁹Andre Hasiholan Pulungan, Ahmad Basid Hasibuan, Luciana Haryono, *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012*.(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)hlm 77

³⁰*Ibid*, hal 64-65

³¹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Keuangan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Indeks, 2017) hlm 146-147

- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- c. Informasi kepatuhan entitas syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik modal *syirkah temporer* dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan berikut:³²

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.

³²Rudianto, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.12.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU dimasa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkap sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar disertai dengan pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya.

H. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi juga dibuat sesuai standar PSAK yang akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan dengan daya banding yang tinggi.

Berdasarkan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, Laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi sektor riil tersebut. Untuk menyusun laporan keuangan, BMT dapat menggunakan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) seperti standar PSAK No.27, Akutansi Perkoperasian, PSAK No 31, Akutansi Perbankan atau Akutansi Perbankan Syariah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha BMT dalam suatu periode tertentu, oleh karena itu BMT dapat mengacu pada standar yang berlaku secara umum.

Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia yang

telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu (PSAK No.27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari:³³

1. Perhitungan Hasil Usaha

suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan Hasil Usaha harus merinc hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

3. Laporan arus kas

suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi antara lain:

- a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota

³³*Ibid*, hlm 11

- b. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya
- c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota
- d. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi
- e. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta
- f. Pembagian SHU dan penggunaan cadangan
- g. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan
- h. Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan-keputusan perhitungan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

I. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan perbankan syariah dan konvensional sangatlah berbeda, laporan keuangan perbankan konvensional menggunakan PSAK No 31 dalam penyusunan laporan keuangannya sedangkan perbankan syariah menggunakan PSAK No 59 yang dirubah menjadi kontrak syariah. Dilatar belakangi oleh meningkatnya keinginan agar lembaga keuangan islam dapat memperluas pada pasar global maka pada tahun 1991 dibentuklah sebuah lembaga penetapan standar di Bahrain yang dinamakan dengan nama *Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Intitution* (FAOIBFI) yang selanjutnya berubah nama menjadi *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Intitution* (AAOIFI).³⁴

³⁴Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Keuangan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, hal 178

Dalam rangka memberikan landasan bagi pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi perbankan syariah. kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia telah disusun dalam bentuk PSAK No. 50 (Revisi 201) tentang Instrumen Keuangan: penyajian, PSAK No 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: pengungkapan, serta PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang penurunan nilai aset dan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang direvisi menjadi PAPSI 2013, selanjutnya diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang kemudian diperjelas lewat No. 15/26/Dpbs tertanggal 10 Juli 2013 mengenai Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia³⁵.

Secara umum Laporan keuangan bank syariah meliputi:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan bank syariah yang disusun berdasarkan PSAK No. 59 (Kontrak syariah) meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Seperti halnya neraca, laporan laba rugi juga mencerminkan peran bank syariah selaku investor dan manajer investasi. Peran bank syariah selaku investor bisa dilihat dari adanya pos pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah.

³⁵ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana Prenada media group : jakarta, 2017) hlm 88

Sedangkan peran bank syariah selaku manajer investasi berkaitan dengan adanya pos pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Pos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai beban.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.

4. Laporan perubahan ekuitas

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan periode pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham. Seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode bersangkutan.

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola bank sebagai manajer investasi berdasar

akad *mudharabah muqayyadah* atau sebagai agen investasi. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shohibul maal* mempercayakan sejumlah modal kepada Mudharib dengan memberikan batasan mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi.

Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atau keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian, imbalan yang diterima sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki untuk diserahkan kepada mustahiq. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shohibul maal* Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.

Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana ZIS selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana ZIS pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS menunjukkan peran bank syariah sebagai pengemban

fungsi sosial yaitu amil zakat. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi aktivitas bank syariah dalam pengelolaan dana ZIS.

Unsur dasar laporan ini meliputi sumber dana, penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana ZIS pada tanggal tertentu. Sumber dana ZIS berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana ZIS berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana ZIS adalah dana ZIS yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*)

Seperti halnya laporan sumber dan penggunaan dana ZIS laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* juga menunjukkan peran bank syariah sebagai pengemban fungsi sosial. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* bertujuan untuk memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas dalam mengelola dana *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman atau sumbangan tanpa imbalan yang memungkinkan peminjan untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Sumber *dana qardhul hasan* berasal dari bank atau pihak lain dari luar bank, seperti infaq dan shodaqoh dari nasabah, pemilik atau yang lainnya, denda dan pendapatan non halal. Dana *qardhul hasan* harus

disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah dan diupayakan agar dalam penyalurannya berfungsi sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan selama satu jangka waktu tertentu dan saldo pada tanggal tertentu. Sebagaimana yang disebutkan diatas sumber dana laporan ini berasal dari infaq, shodaqoh, denda dan pendapatan non halal. Disamping untuk pinjaman penggunaan dana *qordhul hasan* juga berupa penyaluran untuk sumbangan. Saldo dana *qordhul hasan* adalah dana *qordhul hasan* yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

J. Laporan keuangan BMT

Standar khusus akuntansi untuk koperasi disusun sebagai dasar atau pedoman pembuatan laporan yang ditujukan bagi rata-rata pemakai dan penyusun laporan keuangan. Dengan diterbitkannya standar khusus akuntansi oleh IAI berarti koperasi dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik koperasi. Berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis keuangan dan legalitas BMT yang berbadan hukum koperasi, maka penyusunan praktik laporan keuangan BMT memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ³⁶

1. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat dipercayadan bermanfaat bagi pengambil keputusan mengenai posisi keuangan BMT dalam suatu periode tertentu.

³⁶Nurul, Purnama, Novarini, Yosi, *Baitul Mal Wa Tanwil" Sebuah Tinjauan Teoritis"*, hlm, 173

2. Laporan keuangan BMT juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai strategi, kebijakan, dan hasil usaha berbagai pihak yang berkepentingan guna menilai kondisi BMT selama satu periode. Agar laporan keuangan BMT bermanfaat bagi pihak yang memang berkepentingan menggunakannya, laporan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu relevan, dapat dipahami, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap. Untuk mempermudah para pengguna mendapatkan informasi tentang laporan keuangan, maka laporan keuangan BMT dibuat berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BMT pada tanggal tertentu, meliputi aktiva, kewajiban dan kekayaan bersih. Didalamnya tercakup saldo akhir dana ZIS dan saldo investasi sektor riil. Dana ZIS disajikan dalam kewajiban sebesar saldo akhir yang siap disalurkan, sedangkan sektor riil disajikan dalam akun investasi.

2. Perhitungan hasil usaha

Perhitungan hasil usaha Laporan ini menggambarkan hasil kinerja BMT pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan, ditambah dengan penghasilan bersih sektor riil, laporan ini tidak meliputi kinerja sektor ZIS, yang akan dilaporkan dalam laporan tersendiri.

Laporan perhitungan sisa hasil usaha menyajikan detail mengenai rincian beban operasi dalam laporan tersebut. Penyajian beban operasi pada laporan perhitungan sisa hasil usaha itu sendiri secara konseptual dapat dibenarkan item dan

pos laporan keuangan. Laporan perhitungan sisa hasil usaha BMT disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya. Dan cara penyajian laporan tersebut adalah wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional

3. Laporan arus kas

Laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluarnya kas, yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan BMT dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan BMT untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas meliputi tiga bentuk aktivitas BMT, yaitu arus kas operasi, investasi dan pendanaan.

4. Laporan dana zakat infaq dan shodaqoh

Laporan ini menggambarkan arus kas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh oleh BMT meliputi sumber perolehannya, pemyalurannya kepada yang berhak dan perubahan saldonya. Hal zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam Al-Qur'an, sedangkan infaq penggunaannya tidak terbatas

5. Catatan atas laporan keuangan

Bagian ini disusun dengan maksud mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Perincian dan penjelasan setiap pos.
- c. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu

6. Laporan sektor riil

Laporan ini merupakan laporan keuangan untuk sektor riil yang meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Meskipun laporan ini bersifat tambahan, BMT harus membuatnya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pemakai laporan keuangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT PRIMA

BMT merupakan lembaga keuangan informal yang dijalankan atas dasar syariah Islam. Untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan secara *de facto* harus memiliki dua unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dan perbankan syariah. BMT terdiri atas dua lembaga yaitu *Baitul Mâl* dan *Baitul Tamwil*. BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT sesuai namanya terdiri dari 2 fungsi yaitu *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), *Baitul Maal*, (rumah harta).³⁷ Dana-dana ini oleh BMT akan disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya.

Secara teknis definisi mengenai Baitul Tamwil adalah suatu lembaga keuangan Islam yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat yang bersifat komersial dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat untuk usaha-usaha produktif. Sedangkan Tamwil, murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni.

E. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya BMT Prima

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari ketua, BMT Prima ini berdiri sekitar tahun 2010 dengan anggota masih 5 orang, yaitu bapak Kusnan Zain, bapak Sarni, bapak Sunali Efendi, bapak Kurniyadi, dan bapak Harun Syarif tanpa

³⁷Andri Soemitro, *Bank dan lembaga Keuangan syariah*, hlm450

adanya anggota tambahan dan hanya berjalan selama 2 tahun, karna pada awalnya BMT Prima adalah cabang dari BMT foskopis namun , BMT Foskopis mengalami colaps sehingga BMT Prima bertahan dan membangun sendiri BMT Prima dari awal dengan beranggotakan 5 orang yang kemudian bertambah menjadi 20 orang. Seiring dengan berjalanya waktu BMT Pima kembali bangkit.

Pada tanggal 21 Januari 2013 BMT Prima resmi berbadan hukum *BP :NO.126/BH/VII.5/D.KPPKM/2013* BMT tersebut berbentuk badan hukum KSU dengan kegiatan usaha Unit Jasa Keuangan Syariah/BMT.BMT Prima beralamatkan di Jl.Lintas Timur pasar Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI SUMSEL. ³⁸

Berdiri di tanah ukuran 10 meter × 20 meter yang terletak di samping jalan lintas timur dan bersebelahan dengan pasar Lubuk Seberuk semakin membuat BMT Prima mudah untuk ditemukan karena tempatnya yang strategis, dan para penduduknya yang berprofesi sebagai pedagang dan petani, membuat BMT Prima mudah mendapatkan nasabah maupun investor yang bertambah pada setiap minggunya. Namun sebelumnya BMT Prima sempat mengalami keadaan yang tidak stabil dikarenakan salah satu lembaga keuangan yang menaungi BMT Prima mengalami colaps sehingga berpengaruh terhadap keuangan BMT Prima namun, secara perlahan BMT Prima mulai bangkit dari kegagalan lalu berhasil sampai saat ini dengan nasabah yang semakin bertambah. Keamanan dan kenyamanan anggota sangat diperhatikan BMT Surya Amanah. Berbagai cara dilakukan BMT dalam mempertahankan anggotanya diantaranya:

³⁸wawancara, Muhammad Khoiri, 05 april 2017

1. BMT Prima telah bergabung di ABSINDO (Asosiasi BMT seluruh Indonesia).
2. BMT Prima telah mengikuti program penjaminan likuiditas/simpanan di PUSKOPSYAH PALEMBANG
3. BMT Prima telah beraliansi dan bersinergi dengan Bank BRI Syariah dalam bentuk pengamanan likuiditas dan pembiayaan anggota
4. Pelayanan simpanan anggota dengan sistem jemput bolak balik penyetoran maupun penarikan tunai, selama hari kerja dimanapun dan kapanpun
5. Bagi hasil simpanan mudharabah diberikan setiap bulan.
6. Pembiayaan anggota dijamin asuransi syariah

Usaha–usaha tersebut membuahkan hasil yang manis bagi BMT, ini terbukti dengan jumlah anggota BMT Prima telah mencapai sekitar 1000 lebih. Dan selama 4 tahun berjalan modal awal telah menjadi lebih dari 1 milyar.³⁹ Sebuah hasil yang patut dibanggakan.

F. Struktur Organisasi BMT Prima

Dalam suatu lembaga tentu harus memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang kegiatan agar tercapainya suatu tujuan utama dalam sebuah perusahaan. Dengan struktur organisasi yang sudah terbentuk, manajemen akan lebih mudah untuk mengawasi agar terlaksananya sebuah pekerjaan yang ada dan melaksanakan pengawasan yang tepat atas semua kegiatan yang menyangkut semua fungsi dalam organisasi. Maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mencapai tujuan agar

³⁹wawancara, Muhammad Khoiri, 05 april 2017

dapat memenuhi keberhasilan suatu tujuan perusahaan. Dengan demikian struktur organisasi harus disusun dengan berbagai bentuk agar menegaskan suatu wewenang kepada para karyawan yang dapat mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan wewenang dan aturan perusahaan.

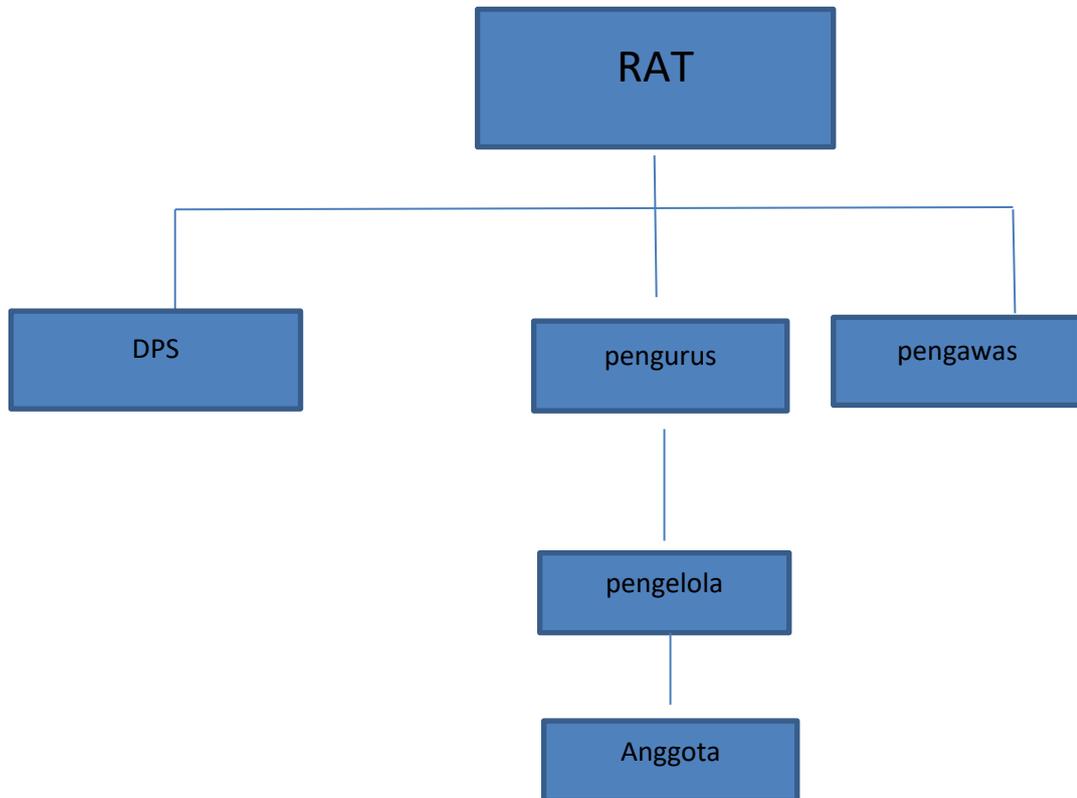
Struktur organisasi merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa, sehingga kerangka itu menunjukkan suatu hubungan di antara bagian-bagian atau pada bidang kerja masing-masing karyawan maupun orang-orang yang diletakkan pada kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam bentuk dan susunan yang telah diatur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, adapun struktur organisasi yang terbentuk di BMT Prima. Menurut Muhammad Ridwan struktur organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri seperti berikut:⁴⁰

1. Musyawarah anggota tahunan.
2. Dewan pengurus
3. Dewan pengawas syariah.
4. Dewan pengawas manajemen.
5. Pengelola yang dapat terdiri minimal : manajer, marketing, accounting dan kasir

Adapun struktur organisasi BMT Prima yaitu :

⁴⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 140.

GAMBAR 3.1
STRUKTUR UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH BMT PRIMA



RAT (rapat akhir tahun), merupakan rapat pemegang saham sebagai forum tertinggi untuk memutuskan segala kebijakan yang berkenaan dengan kemajuan BMT Prima. Pengurus mewakili pemegang saham yang mengawasi dan mengarahkan pengelolaan BMT. Adapun pengurus BMT Prima adalah:

Ketua : Muhammad Kurniadi S.P.

Bendahara : Hariyanto

Sekretaris : Muhammad Khoiri

Dewan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri orang-orang ahli dalam hukum Islam yang sengaja dibentuk untuk mengawasi operasi analisis produk BMT sehingga sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Badan Pengawas:

2. Sumarto. S.Pt
3. Ahmad Rifa'i S.P.
4. Ahmad Shuhada

Pengelola :

1. Manager operasional : Muhammad Khoiri
2. Manager pemasaran : Hariyanto

Staf Marketing:

1. Habib Soleh
2. Muhammad Syaifudin
3. Wayan Khoirul. S.H.i
4. Abdul Karim
5. Hariyanto. S.E.i
6. Rozikin

Teller

1. Ratna Hastuti
2. Fadilatul Hasanah
3. Siti Maratul Magfiroh

Freelance :

1. Bahrul Ulum
2. Espono
3. M Royani Qolbi
4. Zulfikar
5. Eko Susanto S.P.i

G. Visi dan Misi BMT Prima

Secara spesifik BMT Prima mempunyai visi yaitu :

“Menjadi pusat koperasi syariah yang memperkokoh anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat “

Untuk meraih misi tersebut BMT Prima mempunyai misi , yaitu :.

1. Mewujudkan Pusat Koperasi Syariah yang amanah dan profesional.
2. Mendorong kinerja anggota dalam membangun perekonomian berdasarkan syariah.
3. Memberikan pelayanan terbaik, proaktif, dan responsif.

H. Produk dan Jasa BMT Prima

a. Penghimpunan Dana

Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum. BMT Prima memiliki tujuan membangun memberdayakan ekonomi umat. Metode yang digunakan untuk

mewujudkan tujuan tersebut adalah BMT prima harus memiliki bermacam-macam usaha. Produk simpanan BMT Prima terdiri dari 4 produk simpanan yaitu:

1. Simpanan *Wadiah* adalah produk simpanan yang menggunakan skema wadiah (titipan), bagi anggota, pribadi, kelompok, lembaga.
2. Simpanan *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang dapat diambil minimal mengendap 1 bulan.
3. Simpanan *Mudharabah* berjangka adalah simpanan investasi yang menggunakan skema mudharabah muthlaqah Fasilitas : jangka waktu 3, 6, 12, 24 bulan, dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMT Prima
4. Simpanan Masa Depan Sejahtera adalah jenis simpanan berjangka yang digunakan untuk simpanan pensiun/simpanan hari tua atau simpanan pendidikan berjangka. Fasilitas : Jangka waktu 2 tahun s.d 20 tahun dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana di BMT Prima diterapkan dalam produk pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending – financing* Produk pembiayaan dikembangkan menjadi 3 konsep yaitu jual beli, bagi hasil serta sewa

1) Konsep Jual Beli

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli adalah penjualan barang dari BMT kepada anggota atau non anggota dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah

margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Produk penyaluran dana dengan konsep jual beli di BMT Prima :

- a) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian selesai (Q.S. An-Nisaa' (4) 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝⁴¹

- b) *Salaam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka tunai (Q.S. Al-Maidah (5) : 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁴².

- c) *Istishna* adalah jual beli dimana *shaani* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari *Mustashni*' (pemesan) pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pesanan.

2) Konsep Bagi Hasil

Pembiayaan dengan konsep bagi hasil merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil

⁴¹29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

⁴² Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

dan jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini bertujuan mendapatkan sekaligus barang dan jasa, Pembiayaan ini dibedakan menjadi:

- a) *Musyarakah* adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan (Q.S.As-Shad (38) : 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ۝٤٣

- b) *Mudharabah* adalah kerjasama antar BMT dengan *mudharib* (anggota) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shohibul mal*) menyerahkan modalnya kepada *mudhorib*/pelaku bisnis untuk dikelola.

3) Konsep Sewa

Penyaluran dana dalam konsep sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat, sehingga jasa merupakan obyek dari pembiayaan ini. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk mendapatkan jasa. Produk konsep sewa di BMT Prima adalah:

⁴³24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat

a) *Ijarah* adalah perjanjian antara BMT (*Muajir*) dengan anggota (*Mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang.

b) *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* adalah perjanjian antara BMT (*Muajir*) dengan anggota (*Mustajir*) sebagai penyewa. *Mustajir* setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. BMT (*Muajir*) dengan anggota (*Mustajir*) sebagai penyewa. *Mustajir* setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

c) jasa Pelayanan

jasa merupakan pengembangan akad pelengkap. Pelayanan jasa BMT Surya Amnanah dioperasikan dengan pola sebagai berikut:

1) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Secara teknis BMT memberikan bentuk pembiayaan kepada anggota yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada tambahan keuntungan dalam pembayaran pinjaman (Q.S. Al Hadid (57) : 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَوَلَّهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

2) *hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang (*over kredit*) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

BAB IV

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BMT PRIMA

F. Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Lembaga Keuangan (PSAK No.27)

Sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya ke masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT⁴⁴, oleh karena itu sebagian besar BMT di Indonesia berbadan hukum Koperasi. Selaku Lembaga yang berbadan hukum koperasi, oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan oleh BMT mengacu pada PSAK No.27. Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan formal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dibawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional⁴⁵.

Apabila BMT memilih berbadan hukum koperasi, maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS. Adapun penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.27 sebagai berikut:

⁴³ Andi Sumitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (2017: 474)

⁴⁴ Ibid, hlm, 478

1. Neraca

Menurut James C Hourne neraca adalah “ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva, dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas pemilik”⁴⁶. Neraca suatu dibentuk dari persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Bagian pertama neraca adalah harta-harta perusahaan, yaitu harta lancar dan harta tetap. aset disusun secara runtut berdasarkan likuiditas, yakni aset yang paling cepat dapat dicairkan menjadi uang atau kas. Bagian kedua berisi kewajiban, yaitu klaim pemberi pinjaman terhadap harta-harta perusahaan dan modal pemilik yaitu nilai investasi pemilik dalam suatu bisnis⁴⁷.

Sedangkan menurut PSAK No.27 Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas, dengan persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Penyajian aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Investasi jangka panjang terdiri dari dua pos yaitu penyertaan pada koperasi dan penyertaan pada non koperasi. Aktiva lain-lain terdiri dari dua pos yaitu aktiva tetap dan beban ditangguhkan.

Penyajian neraca pada pasiva terdiri dari dua komponen, yaitu kewajiban dan ekuitas, kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek agar mudah untuk membedakan mana yang harus didahulukan,

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Rajawali Pers: Jakarta 2010) hlm 30

⁴⁷ Najmudin, *Managemen Keuangan Aktualisasi Syarr'iyah Modern* (Penerbit Andi: Purwokerto: 2011) hlm 69

sedangkan kewajiban jangka panjang meliputi hutang bank dan hutang jangka panjang, sedangkan ekuitas adalah modal koperasi yang didapat dari anggotanya sendiri. Secara keseluruhan neraca dalam PSAK No 27 dapat kita ilustrasikan sebagai berikut:

NERACA
31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

ASET	20XX	20XX	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20XX	20XX
			KEWAJIBAN JANGKA		
ASET LANCAR	xxx	Xxx	PENDEK	xxx	xxx
Kas dan Bank	xxx	Xxx	Utang Usaha	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	Xxx	Utang Bank	xxx	xxx
Piutang Usaha	xxx	Xxx	Utang Pajak	xxx	xxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxx	Xxx	Utang Simpanan Anggota	xxx	xxx
Piutang Pinjaman non Anggota	xxx	Xxx	Utang Dana Bagian SHU	xxx	xxx
Piutang Lain-lain	xxx	Xxx	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Penyusunan piutang tidak tertagih	xxx	Xxx	akan jatuh tempo	xxx	xxx
Persediaan	xxx	Xxx	Biaya Harus Dibayar	xxx	xxx
			Jumlah Kewajiban		
Pendapatan akan diterima	xxx	Xxx	Jangka Pendek	xxx	xxx
Jumlah aset lancar	xxx	Xxx		xxx	xxx
			KEWAJIBAN JANGKA		
	xxx	Xxx	PANJANG	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA			Utang Bank	xxx	xxx
PANJANG	xxx	Xxx	Utang Jangka Panjang		
Penyertaan pada koperasi	xxx	Xxx	Lainnya	xxx	xxx
Penyertaan pada non koperasi	xxx	Xxx	Jumlah KJ PANJANG	xxx	xxx
Jumlah Inves jangka panjang	xxx	Xxx	Ekuitas	xxx	xxx
	xxx	Xxx	Simpanan Wajib	xxx	xxx
ASET TETAP	xxx	Xxx	Simpanan Pokok	xxx	xxx
Tanah atau hak atas tanah	xxx	Xxx	Modal Penyertaan	xxx	xxx
Bangunan	xxx	Xxx	Partisipasi Anggota	xxx	xxx
Mesin	xxx	Xxx	Modal Penyertaan	xxx	xxx
Inventaris	xxx	Xxx	Modal Sumbangan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)	Cadangan	xxx	xxx

Jumlah Aset Tetap	xxx	Xxx	SHU Belum Dibagi	xxx	xxx
ASET LAIN-LAIN	xxx	Xxx	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
Ak. Tetap dalam Konstruksi	xxx	Xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN		
Beban Ditangguhkan	xxx	Xxx	EKUITAS	xxx	xxx
Jumlah ast lain lain	xxx	Xxx			
JUMLAH ASET	xxx	Xxx			

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan perhitungan hasil usaha atau laporan laba/rugi merupakan salah satu dari banyak bagian suatu paket laporan keuangan dan seperti bagian lainnya, laporan laba rugi merupakan bagian dari produk berbagai pilihan, dilaporkan, seperti halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang mempengaruhi hasil yang dilaporkan. *Committee on Terminology* mendefinisikan laba sebagai: “Jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari hasil penghasilan atau penghasilan operasi”⁴⁸. Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian. Laporan perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban, dimana pendapatan diperoleh dari pendapatan anggota dan non anggota. Laporan perhitungan hasil usaha menurut PSAK No 27 adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN HASIL USAHA **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 20xx dan 20xx**

	20xx	20xx
PARTISIPASI ANGGOTA	xxx	xxx
Partisipasi Bruto anggota	xxx	xxx
Beban Pokok	(xxx)	(xxx)
Partisipasi Neto Anggota	xxx	xxx
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA	xxx	xxx
Penjualan	xxx	xxx

⁴⁷ Irham fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm 98

Harga Pokok	(xxx)	xxx)
Laba rugi kotor non anggota	xxx	xxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	xxx	xxx
BEBAN OPERASI	xxx	xxx
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha	xxx	xxx
Beban Perkoperasian	(xxx)	(xxx)
SHU Setelah Beban Perkoperasian	xxx	xxx
Pendapatan dan Beban Lain lain	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos Luar Biasa	xxx	xxx
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	(xxx)	(xxx)
SHU Sebelum Pajak	xxx	xxx
Pajak Penghasilan	(xxx)	(xxx)
SHU Setelah pajak	xxx	xxx

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan arus kas meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu periode tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan wujud dari pencapaian tujuan koperasi. Hal ini harus dipahami benar oleh pihak-pihak didalam maupun luar koperasi, agar koperasi ditempatkan pada posisi yang tepat dan tidak disalah tafsirkan didalam mengevaluasi kinerjanya⁴⁹. Promosi ekonomi anggota pada koperasi dapat berupa:

⁴⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi"Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah"* (Penerbit Andi: Yogyakarta,2015) hlm , 390-391

1. Bagi hasil tabungan yang diterima anggota koperasi lebih tinggi dari bunga yang diterima anggota dari luar koperasi disebut manfaat yang berupa efektifitas tabungan.
2. Margin pembiayaan yang dibayarkan anggota kepada koperasi lebih rendah dari margin pembiayaan atau bunga pinjaman diluar koperasi, disebut manfaat atas efisiensi penarikan pembiayaan.
3. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU untuk anggota.
4. Manfaat lain semisal dalam bentuk biaya transaksi yang murah.

G. Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Lembaga Ekonomi (Kontrak Syariah PSAK 101-110)

Selain fungsi BMT sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi yang berperan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian⁵⁰. Oleh karena itu BMT juga mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan sesuai dengan fungsinya sebagai Lembaga Ekonomi.

Abdel-Magid (1981) menjelaskan tentang masalah akutansi yang dihadapi oleh lembaga keuangan islam. Abdel-Majid menjelaskan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan pada transaksi perbankan islam dan menyimpulkan tentang pentingnya perlakuan akutansi secara tersendiri pada transaksi ini. Perbankan islam harus mengembangkan kebijakan dan praktik akutansi mereka sendiri dan

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 474

sangat membutuhkan pedoman mengenai apakah transaksi yang dilakukan secara aktual patuh dengan prinsip syariah atau tidak⁵¹.

Di Indonesia, pedoman untuk praktek akuntansi perbankan syariah merujuk pada PSAK No 59 yang selanjutnya mengalami perubahan dengan ditetapkannya beberapa standar akuntansi syariah seperti PSAK 101-110 sehingga PSAK No 59 dinyatakan tidak berlaku lagi. Standar akuntansi tersebut dibuat berbasis kontrak syariah diantaranya, PSAK 101 yang menetapkan penyajian laporan keuangan, PSAK 102 mengatur tentang akuntansi atas akad murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi atas akad salam, PSAK 104 tentang akuntansi atas akad istisna, PSAK 105 tentang akuntansi atas akad mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi atas akad musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi atas akad ijarah⁵². Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

1. Neraca

Neraca merupakan informasi yang menggambarkan tentang kondisi dan situasi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas, serta berbagai item lainnya yang termasuk disana, untuk selanjutnya informasi tersebut dijadikan sebagai alat dalam mendukung proses pengambilan keputusan⁵³. Jadi persamaan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{INVESTASI TIDAK TERIKAT} + \text{EKUITAS}$$

⁵⁰ Kausar Riza Salman, *Akuntansi perbankan syariah Berbasis PSAK Syariah*, hlm 177

⁵¹ Ibid, hlm 178

⁵² Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Alfabeta: Bandung, 2012) hlm 29

Aktiva mempunyai istilah lain yaitu aset, penyajian menggunakan kata aset untuk menggantikan kata aktiva. Adapun pengertian aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri atau dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Secara keseluruhan neraca pada PSAK No 101-110 diilustrasikan sebagai berikut⁵⁴:

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PERIODE 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX**

ASET	20XX	20XX
Kas	xxx	Xxx
Penempatan pada bank Indonesia	xxx	Xxx
Giro Pada Bank Lain	xxx	Xxx
Penempatan Pada Bank Lain	xxx	Xxx
Investasi Pada Efek/Surat Berharga	xxx	Xxx
Piutang		
Murabahah	Xxx	xxx
Salam	Xxx	xxx
Istisna	Xxx	xxx
Ijarah	Xxx	xxx
Jumlah Piutang	xxx	Xxx
Pembiayaan		
Mudharabah	Xxx	xxx
Musarakah	Xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx
Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	xxx	Xxx
Aset Ijarah	xxx	Xxx
Aset Istisna' dalam penyelesaian	xxx	Xxx
Penyertaan Pada Entitas Lain	xxx	Xxx
Aset Tetap Dan Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Aset Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx
KEWAJIBAN		

⁵³ Kausar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah "Berbasis PSAK Syariah"*, hlm 163-165

Kewajiban segera	XXX	XXX	XXX
Bagi Hasil Yang Belum Dihasilkan	XXX	XXX	XXX
Simpanan	XXX	XXX	XXX
Simpanan Dari Bank Lain	XXX	XXX	XXX
Utang			
Salam	Xxx	xxx	
Istisna'	Xxx	xxx	
Jumlah Utang		xxx	xxx
Kewajiban Pada Bank Lain	xxx		xxx
Pembiayaan Yang Diterima	xxx		xxx
Utang Pajak	xxx		xxx
Estimasi Kerugian	xxx		xxx
Pinjaman Yang Diterima	xxx		xxx
Pinjaman Subordinasi	xxx		xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx		xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bank			
Tabungan Mudharabah	Xxx	xxx	
Deposito Mudharabah	Xxx	xxx	
Jumlah DST Bukan Bank		xxx	xxx
DST Dari Bank			
Tabungan Mudharabah	Xxx	xxx	
Deposito Mudharabah	Xxx	xxx	
Jumlah DST Bukan Bank		xxx	xxx
Musyarakah		xxx	xxx
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal Disetor	xxx		xxx
Tambahan Modal Disetor	xxx		xxx
Saldo Laba	xxx		xxx
JUMLAH EKUITAS	xxx		xxx
JUMLAH KEWAJIBAN, DST dan EKUITAS	xxx		xxx

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas keuangan yang disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai komponen kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Hal-hal yang berkaitan langsung dengan

pengukuran penghasilan adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atau bagi hasil. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau pendapatan bahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (KDPPLKS paragraf 97). Sedangkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana baik keuntungan dan kerugian hasil investasi entitas dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

Berikut adalah bentuk umum laporan laba rugi yang mengacu pada penyajian laporan syariah yang diterbitkan IAI tahun 2007⁵⁵:

LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

Uraian	20xx	20xx
Pendapatan		
Pendapatan Pengelola Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib		
Pendapatan Dari Jual Beli:		
Pendapatan Margin Murabahah	xxx	xxx
Pendapatan Bersih Salam	xxx	xxx
Pendapatan Bersih Istisna	xxx	xxx
Pendapatan Sewa-bersih:		

⁵⁴ Osman Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, hlm 32-33

Pendapatan Bersih Ijarah	xxx	xxx
Pendapatan Dari Bagi Hasil:		
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	xxx	Xxx
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	xxx	Xxx
Jumlah Pendapatan Pengelola Dana oleh bank sebagai Mudharib	xxx	Xxx
Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil	(xxx)	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx	Xxx
Pendapatan usaha lainnya:		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	Xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	Xxx
Jumlah pendapatan usaha lainnya	xxx	Xxx
Beban Usaha		
Beban kepegawaian	xxx	Xxx
Beban administrasi dan umum	xxx	Xxx
Beban penyusutan dan Amortisasi	xxx	Xxx
Beban bonus Giro Wadiah	xxx	Xxx
Beban Estimasi kerugian komitmen	xxx	Xxx
Bebal lain-lain	xxx	Xxx
Jumlah Beban Usaha	xxx	xxx
Laba (Rugi) Usaha	xxx	xxx
Pendapatan dan Beban Non Usaha	(xxx)	(xxx)
Pendapatan non usaha	xxx	xxx
Jumlah pendapatan (beban) non usaha	xxx	xxx
Laba (Rugi) sebelum pajak	xxx	xxx
Beban Pajak	(xxx)	(xxx)
Zakat	xxx	xxx
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	xxx	xxx

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan Standar Akutansi Keuangan Terkait.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode tertentu berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan

ekuitas kecuali untuk perubahan dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan bank syariah selama periode yang bersangkutan (PSAK 101)⁵⁶.

Laporan perubahan ekuitas yang disajikan entitas syariah meliputi beberapa komponen utama laporan keuangan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi modal dengan pemilik.
- e. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing para pemegang saham, giro dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

⁵⁵ Osmad Muthaaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Graha Ayu: Yogyakarta, 2012) hlm 34

Penyajian laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan⁵⁷.

- a. Saldo awal dana investasi syariah
- b. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai perunit penyertaan pada awal periode.
- c. Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan.
- d. Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan.
- e. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat.
- f. Imbalan bank syariah sebagai agen investasi.
- g. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat.
- h. Saldo akhir dana investasi terikat.
- i. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai perunit penyertaan pada akhir periode.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu,

⁵⁶ Kausar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah "Berbasis PSAK Syariah"* hlm 167-168.

serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu⁵⁸.

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
PERIODE 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX**

Uraian	20xx		20xx	
Sumber Dana Zakat				
Zakat Dari Dalam bank syariah	Xxx		Xxx	
Zakat dari pihak luar bank syariah	Xxx		Xxx	
Jumlah sumber dana zakat			xxx	Xxx
Penggunaan Dana Zakat				
Fakir	(xxx)		(xxx)	
Miskin	(xxx)		(xxx)	
Amil	(xxx)		(xxx)	
Mualaf	(xxx)		(xxx)	
Orang yang terlilit utang (Gharim)	(xxx)		(xxx)	
Riqab	(xxx)		(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)		(xxx)	
Orang yang dalam perjalanan (Ibnu sabil)	(xxx)		(xxx)	
Jumlan penggunaan dana zakat		(xxx)		(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat		Xxx		Xxx
Saldo awal dana zakat		Xxx		Xxx
Saldo akhir dana zakat		Xxx		Xxx

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Entitas bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dan kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Berikut adalah bentuk umum laporan

⁵⁷*Ibid*, hlm 171

sumber dan penggunaan dana kebajikan yang mengacu pada penyajian laporan syariah yang diterbitkan IAI tahun 2007:

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PERIODE 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX**

	20xx	20xx
Sumber Dana Kebajikan		
Infak dan zakat dari bank syariah	xxx	xxx
Sedekah	xxx	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx	xxx
Pengembangan dana kebajikan produktif	xxx	xxx
Denda	xxx	xxx
Pendapatan non halal	xxx	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan		Xxx xxx
Penggunaan Dana Kenajikan		
Dana kebajikan produktif	(xxx)	(xxx)
Sumbangan	(xxx)	(xxx)
penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)	(xxx)
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx	Xxx
Saldo awal dana zakat	xxx	Xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx	Xxx

H. Laporan Keuangan BMT Prima

Laporan keuangan BMT disusun atas dasar *Acrual Basic*. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas dan setara kas, diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan dalam periode berjalan. Diterapkannya metode *Akrual Basic* karena metode inilah yang lebih sesuai dengan karakteristik bagi hasil.

1. Neraca

Neraca BMT Prima terdiri dari Aktiva dan Pasiva. Aktiva dalam neraca dibagi kedalam dua bagian yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva

terdiri dari kewajiban dan ekuitas.⁵⁹ Secara keseluruhan neraca diilustrasikan sebagai berikut:

	Aktiva	Rp		Pasiva	Rp
1.1	Aktiva lancar		1.3	Kewajiban	
	Kas			Sisuka Basil MBA	
	Bank			Sisuka Basil Al Barokah	
	Pembiayaan MBA			Sisuka Basil Pelajar	
	Pembiayaan MSA			Sisuka Lain lain	
	Pembiayaan MRA			Simades	
	Pembiayaan IMJ			Hutang Bank	
	Pembiayaan QH			Dana Kesehatan	
	Akumulasi Ker Piutang			PSV Lainnya	
	Antar BMT Aktiva		1.4	Ekuitas	
	Rupa rupa Aktiva			Simpanan wajib anggota	
				Simpanan Pokok Anggota	
1.2	Aktiva Tetap			Dana Cadangan	
	Tanah			SHU Belum Dibagi	
	Stok Barang				
	Inventaris			JML	
				L/R	
				L/R BLN BERJALAN	
	JML AKTIVA			JML PASIVA	

Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan yang perusahaan yang bersangkutan yang dalam penelitian ini perusahaan yang dimaksud adalah BMT Prima. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Dengan mengadakan analisis terhadap pos pos neraca akan dapat diketahui gambaran tentang akutansi keuangannya. Laporan keuangan yang membahas neraca di BMT Prima terdiri dari aktiva dan pasiva. Dimana aktiva memuat aktiva lancar dan aktiva tetap. Pos-pos dalam aktiva lancar terdiri dari kas, kas yang dititipkan pada bank, pembiayaan yang disalurkan dikurangi akumulasi kerugian piutang, dan rupa-rupa aktiva. Sedangkan aktiva tetap memuat gedung, inventaris dan kendaraan.

⁵⁹ wawancara, Muhammad Khoiri, 05 april 2017

Klasifikasi aktiva tersebut telah sesuai dengan aturan klasifikasi aktiva dalam neraca PSAK No 27 yang juga terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Pasiva dalam neraca BMT Prima terdiri dari kewajiban dan ekuitas, pos-pos dalam kewajiban terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang mempunyai komponen antara lain bagi hasil untuk produk simpanan, hutang bank, dans kesehatan, tunjangan hari raya dan pasiva lainnya. Kewajiban dalam BMT Prima sudah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sesuai dengan klasifikasi pada PSAK No 27. Dalam klasifikasi ekuitas BMT Prima terdiri dari simpanan, hibah, cadangan umum dan SHU Belum dibagi/ SHU tahun lalu, pos pos tersebut telah sesuai dengan aturan ekuitas dalam neraca yang terdapat di PSAK No. 27 yang juga terdiri dari simpanan dan SHU yang belum dibagi.

1. Perhitungan hasil usaha

Perhitungan usaha terdiri dari pendapatan dan beban, akun-akun yang termasuk dalam laporan perhitungan hasil usaha adalah :

**BMT PRIMA
PERHITUNGAN HASIL USAHA**

No	Nama Rek	Neraca awal		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	Pendapatan				
	Pendapatan Murobahah	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Musyarokah	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Mudhorobah	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Ijaroh Multi Jasa	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Hawalah	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Adm BMT	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Murobahah Harian	Xxx	xxx	xxx	xxx

	Pendapatan Materai	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Lain	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Pospay	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan	Xxx	xxx	xxx	xxx
		Xxx			
	Biaya	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya ATK	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Rapat	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Kesehatan	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya THR	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Administrasi BMT	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Listrik	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Notaris	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Telepon	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya Surfior	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya sewa	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya penyusutan	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya pajak	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Biaya lain-lain	Xxx	xxx	xxx	xxx
		Xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA/BEBAN	Xxx	xxx	xxx	xxx
	SHU PERIODE	Xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH	Xxx	xxx	xxx	xxx

Laporan perhitungan hasil usaha BMT Prima terdiri dari pendapatan dan beban/biaya. Pendapatan BMT Prima diperoleh dari pendapatan jasa. Pendapatan dalam perhitungan hasil usaha BMT Prima tidak dibedakan antara pendapatan jasa dari anggota dan non anggota sehingga seluruh transaksi pada pos pos kewajiban diakumulasikan berdasarkan jenis transaksinya saja. Hal ini bisa dilihat dari pos-pos yang ada dalam pendapatan yaitu pendapatan murobahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, dan pendapatan dari jasa yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan laporan perhitungan hasil usaha dalam PSAK No 27 yang mengelompokkan pendapatan dari anggota dan non anggota.

Kelompok beban dalam laporan hasil usaha terdiri dari beban pelayanan dan beban untuk karyawan BMT, akan tetapi kedua beban tersebut tidak dikelompokkan sendiri-sendiri seperti beban usaha dan beban perusahaan tetapi dijadikan satu dalam kelompok beban. Laporan perhitungan usaha BMT Prima dapat dilihat pada lampiran, analisis terhadap laporan hasil usaha dapat memberikan gambaran tentang perkembangan usaha perusahaan.

2. Laporan arus kas

- a. Laporan arus kas dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh BMT.
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan

3. Laporan ZIS

Laporan ZIS pada laporan BMT Prima masuk dalam Laporan neraca dan masuk dalam komponen Pasiva. Laporan ZIS sendiri terdiri dari:

- a. Titipan dana zakat
- b. Dana infaq.

I. Perbedaan penyajian laporan keuangan BMT Prima dengan Bank Syariah

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi selama suatu periode tertentu, penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah berbeda antara satu dengan yang lain, misalnya saja penyajian laporan keuangan pada objek yang

sedang diteliti yaitu BMT Prima dengan perbankan syariah. Berdasarkan Permen KUKM No.04/per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi menetapkan bahwa koperasi menggunakan SAK ETAP. Jadi secara umum koperasi di Indonesia menggunakan SAK ETAP, termasuk BMT Prima yang secara legalitas berbadan hukum koperasi. BMT yang memperoleh izin usaha koperasi sebelum berlakunya UU LKM, maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme KJKS.

Untuk menyusun laporan keuangan, BMT menggunakan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI), yaitu PSAK No. 27, Akutansi Perkoperasian, PSAK No. 31, Akutansi Perbankan, dan PSAK No.59. untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha BMT dalam suatu periode tertentu, pihak manajemen akan membuat laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan modal⁶⁰. Sedangkan perbankan syariah menggunakan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. perbedaan laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan penyajian laporan keuangan BMT dan Bank Syariah

BMT	BANK SYARIAH
a. Neraca	1. Neraca
b. Perhitungan hasil usaha	2. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas	3. Laporan arus kas
d. Laporan ZIS	4. Laporan perubahan ekuitas
e. Catatan atas laporan keuangan	5. Laporan perubahan dana investasi terikat
f. Laporan sektor riil	6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
	7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

⁵⁸ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil* "Sebuah Tinjauan Teoritis" (Amzah: Jakarta, 2016) hlm, 170

1. Neraca

Neraca pada laporan keuangan BMT persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Sedangkan neraca pada laporan keuangan perbankan syariah persamaannya sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{INVESTASI TIDAK TERIKAT} + \text{EKUITAS}$$

Dari persamaan kedua neraca tersebut terdapat perbedaan dalam permodalan. Sumber modal BMT hanya diperoleh dari ekuitas, sedangkan pada perbankan syariah, sumber modal diperoleh dari ekuitas dan investasi tidak terikat. Adapun dalam hal aktiva menyajikan penyajian yang sama antara lain:

Tabel 4.2
Persamaan Penyajian Aktiva BMT dan Aktiva Perbankan Syariah

Aktiva BMT	Aktiva Bank Syariah
1. Kas	1. Kas
2. Bank	2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Pembiayaan	3. Giro pada bank lain
4. Penempatan bank/BMT	4. Efek-efek
5. Akumulasi penyusutan	5. Piutang
6. Aktiva tetap	6. Pembiayaan
7. Aktiva lain-lain	7. Persediaan
	8. Aktiva yang diperoleh untuk ijarah
	9. Aktiva istisna dalam penyelesaian
	10. penyertaan
	11. investasi lain
	12. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
	13. Aktiva lain

Akun akun pada aktiva yang ada dalam laporan keuangan BMT hampir sama dengan akun akun yang ada dalam aktiva laporan keuangan Bank Syariah, seperti Kas, pembiayaan, akumulasi penyusutan, aktiva tetap. Bila dilihat dari persamaan neraca, laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK No. 27 tentang penyajian laporan keuangan pada koperasi, sedangkan pada penyajian aktiva tidak sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 27 karena tidak adanya akun persediaan. Laporan keuangan BMT tidak mengacu pada PSAK No. 101 dikarenakan tidak ada pemisahan pos pada akun pembiayaan dan piutang, pada laporan BMT juga tidak terdapat akun penyertaan, investasi lain, aktiva istisna dan ijarah. Adapun dalam hal pasiva penyajiannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Persamaan Penyajian Pativa BMT dan Aktiva Perbankan Syariah

Pasiva BMT	Pasiva Bank Syariah
Hutang Lancar/ Kewajiban	1. Kewajiban
1. Sisuka basil Mudhorobah	2. Simpanan
2. Sisuka Basil Albarokah	a. Giro Wadiah
3. Sisuka Basil Pelajar	b. Tabungan wadiah
4. Sisuka Jaka Wadi'ah	3. Simpanan Bank Lain
5. Sisuka Jaka Qurban	a. Giro Wadiah
6. Sisuka Jaka Pendidikan	b. Tabungan wadiah
7. Simpanan lain-lain	5. Kewajiban kepada bank lain
8. Tabungan Ziaroh	6. pembiayaan yang diterima
9. Dana Pendidikan	7. SHU tapi belum dibagi
10. Tabungan Pernikahan	8. Hutang pajak
11. Dana Infaq	9. Hutang lainnya
12. Titipan Dana Zakat	10. Pinjaman subordinasi
13. Dana Rapat	11. Investasi tidak terikat
14. Hutang Lain/ Kewajiban lain	12. Investasi tidak terikat dari bukan bank
Modal Sendiri/Ekuitas	13. Investasi tidak terikat dari bank
Simpanan Anggota	a. Tabungan mudharabah
Simpanan Mandiri	b. Deposito
Simpanan Pokok	14. Ekuitas
Simpanan Wajib	15. Modal disetor
Simpoksus	16. Tambahan modal disetor

Donasi Dana Resiko Dana Cadangan SHU tahun Lalu	17. Saldo laba (rugi)
--	-----------------------

Pasiva dalam neraca BMT terdiri dari hutang (kewajiban) dan ekuitas, sesuai dengan PSAK No 27, dimana kewajiban merupakan kewajiban-kewajiban kepada anggota, non anggota dan karyawan BMT. Berbeda dengan aktiva, penyajian pasiva BMT sudah sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 27 dimana kewajiban sudah dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas menggambarkan modal yang diperoleh dari anggotanya yang mayoritas berupa simpanan-simpanan, yang diantaranya simpanan wajib anggota yang merupakan ciri khusus dari sebuah lembaga yang bernama koperasi.

Pasiva dalam bank syariah terdiri dari kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas sesuai dengan PSAK No 101. Kewajiban merupakan kewajiban bank kepada nasabah dan kewajiban pada bank lain. Modal bank digambarkan dalam investasi tidak terikat dan ekuitas. Investasi tidak terikat berasal dari bank dan bukan bank, dan ekuitas berasal dari modal sendiri dan modal yang disetor. Investasi tidak terikat adalah investasi yang hanya dimiliki bank syariah dan merupakan modal bank syariah yang membedakan dengan koperasi.

2. Perhitungan hasil usaha dengan laporan laba rugi

Laporan perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha LKS atau Bank Syariah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama LKS atau Bank Syariah dan

operasi lainnya⁶¹. Sedangkan laba rugi adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi, atau dapat diartikan sebagai kelebihan (defisit) penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi⁶². Dari penjelasan diatas dapat diartikan, jika dalam perhitungan hasil usaha pendapatan dan beban masuk dalam komponennya sedangkan dalam perhitungan laba rugi pendapatan diperoleh dari hasil pengurangan HPP dan biaya yang artinya biaya/beban mempunyai posisi tersendiri pada laporan keuangan. Perbandingan antara perhitungan hasil usaha dan laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan laporan laba rugi BMT dan Laporan Laba Rugi Bank Syariah

Perhitungan hasil usaha BMT	Laporan Laba rugi Bank Syariah
Pendapatan	Pendapatan Usaha Utama
Pendapatan Murobahah	Pendapatan dari jual beli
Pendapatan Musyarokah	Pendapatan margin murabahah
Pendapatan Mudhorobah	Pendapatan margin salam
Pendapatan Ijarah Multi Jasa	Pendapatan margin istisna
Pendapatan Hawalah	Jumlah pendapatan jual beli
Pendapatan Adm BMT	Pendapatan dari sewa
Pendapatan Murobahah Harian	Pendapatan bersih ijarah
Pendapatan Materai	Pendapatan dari bagi hasil
Pendapatan Notaris	Pendapatan bagi hasil mudharabah
Pendapatan Pembinaan	Pendapatan bagi hasil musyarakah
Pendapatan Simp Karyawan	Jumlah pendapatan bagi hasil
Pendapatan Haji	Pendapatan Usaha Utama
Pendapatan Lain	Pendapatan usaha lainnya
Pendapatan Pospay	Pendapatan imbalan jasa perbankan
Jumlah Pendapatan	Pendapatan imbalan investasi terikat

⁵⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi "Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah"* (2014, : 321)

⁶⁰ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (2012: 98)

Biaya/Beban	Beban usaha
Biaya ATK	Beban kepegawaian
Biaya Rapat	Beban administrasi
Biaya Kesehatan	Beban penyusutan dan amortisasi
Biaya THR	Beban usaha lain
Biaya Administrasi BMT	Jumlah Beban Usaha
Biaya Listrik	Laba (rugi) Usaha
Biaya Notaris	Pendapatan dan beban non usaha
Biaya Telepon	Pendapatan non usaha
Biaya Surfior	Beban Non usaha
Biaya Bonus Komisi	Jumlah Pendapatan (beban) non usaha
Biaya Transport	Laba (Rugi) sebelum pajak
Biaya Pelatihan	Beban pajak
Biaya Foto copy	Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan
Biaya Lain	
JUMLAH BIAYA/BEBAN	
SHU PERIODE	
JUMLAH	

Laporan laba/rugi disusun untuk melihat hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan akan memperoleh laba apabila pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penyusunan laporan laba/rugi didasarkan pada pendapatan dan biaya yang diakui secara *akrual basis*, sedangkan untuk perhitungan distribusi pendapatan atau hasil usaha menggunakan dasar kas basis⁶³.

Akutansi berbasis Kas hanya mengakui pendapatan pada saat penerimaan kas dan beban pada saat pengeluaran kas, secara umum akuntansi berbasis kas tidak dapat

⁶¹ Nurul, Purnama, Novarini, Yosi, *Baitul Mal Wa Tamwil "Sebuah Tinjauan Teoritis"* (2016: 179)

menggambarkan informasi keuangan secara wajar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual didalamnya mengandung kas dan non kas, hal ini karena transaksi yang dilakukan perusahaan meliputi transaksi tunai dan non tunai⁶⁴.

Berdasarkan pengertian diatas, laporan yang disajikan oleh BMT Prima disajikan secara Kas basis dimana dalam laporan tersebut pendapatan diposisikan sebagai penerimaan kas, sedangkan beban sebagai pengeluaran kas. Sedangkan menurut Fatwa DSN No: 14/DSN-MUI/IX/2000, pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem *Accrual basis* atau *cash basis* dalam administrasi keuangan. Dilihat dari kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya menggunakan *Accrual Basis*, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya menggunakan *Cash Basis*⁶⁵.

Pada laporan laba rugi BMT Prima dapat dilihat bahwasanya posisi pada pos pendapatan tidak ada perbedaan signifikan antara pendapatan operasi utama dan pendapatan sewa. Begitu juga dengan beban yang disajikan dalam laporan keuangan BMT Prima tidak terdapat pemisahan pos seperti beban kepegawaian, beban bagi hasil atau biaya operasional lainnya. Sedangkan pada laporan laba rugi yang disajikan oleh Perbankan syariah penempatan posisi laporan keuangan pada tiap transaksi yang dilakukan, misalnya pemisahan antara pendapatan jual beli dan pendapatan sewa serta pendapatan bagi hasil. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jelas dalam menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau bank syariah dalam satu periode tertentu.

⁶² Winwin, Mubarak, *Kualitas Pelaporan Keuangan “Kajian Teoritis dan Empiris”* (2017, 34)

⁶³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi”Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah”* hlm 108

3. Laporan Arus Kas

Tabel 4.3
Perbandingan laporan Arus Kas BMT dan Laporan Arus Kas Bank Syariah

Laporan Arus Kas BMT	Laporan Arus Kas Bank Syariah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan arus kas antara BMT dan Bank Syariah sama karena operasional kedua lembaga tersebut sama.

4. Laporan ZIS

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu periode tertentu serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu⁶⁴. Dalam laporan yang disajikan oleh BMT Prima laporan sumber dan Penggunaan Dana Zakat tidak disajikan secara terpisah, dalam laporan keuangan BMT Prima dana zakat hanya disajikan pada pos pasiva dengan nama akun dana infak dan titipan dana zakat, hal ini dilakukan karena jumlah dana yang masih minim. Sedangkan dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah komponen penting dalam laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4

⁶⁴ Kausar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah "Berbasis PSAK Syariah"* hlm 171

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat BMT dan Bank Syariah

Uraian	20xx	Keterangan
Saldo Awal Dana ZIS	Rp. Xxxx	
Sumber Dana ZIS		
Zakat BMT	Rp. Xxxx	
Zakat anggota BMT	Rp. Xxxx	
Zakat Pihak Luar BMT	Rp. Xxxx	
Infak	Rp. Xxxx	
Sedekah	Rp. Xxxx	
Jumlah Dana ZIS	Rp. Xxxx	
Penggunaan Dana ZIS		
Fakir	Rp. Xxxx	
Miskin	Rp. Xxxx	
Amil	Rp. Xxxx	
Muallaf	Rp. Xxxx	
Gharimin	Rp. Xxxx	
Riqab	Rp. Xxxx	
Sabillillah	Rp. Xxxx	
Ibnu Sabil	Rp. Xxxx	
Jumlah Penggunaan Dana ZIS	Rp. Xxxx	
Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan	Rp. Xxxx	
Saldo Akhir Dana ZIS	Rp. Xxxx	

J. Analisis Kualitatif

Sub bab ini merupakan hasil keseluruhan dari seluruh analisis yang dilakukan sebelumnya. Setelah disebutkan diatas, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akutansi, maka laporan keuangan harus relevan dan andal agar bermanfaat bagi penggunanya. Secara umum laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan arus kas. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, laba rugi menggambarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh suatu perusahaan, laporan arus kas menggambarkan operasional perusahaan.

BMT Prima juga mempunyai laporan keuangan dalam menjalankan usahanya, laporan keuangan BMT Prima mengacu pada PSAK No. 27 digunakan sebagai acuan karena BMT berbadan hukum koperasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) tentang penyusunan laporan keuangan BMT, yaitu PSAK No 27, Akutansi Perkoperasian, PSAK No 31, Akutansi perbankan, dan PSAK No 59, untuk mempertanggung jawabkan kegiatan usaha BMT dalam suatu periode tertentu, pihak manajemen akan membuat laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan modal⁶⁷.

Neraca dalam laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK No 27 tentang akutansi koperasi. Neraca tersebut terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, kewajiban menggambarkan kewajiban-kewajiban BMT, Ekuitas yang merupakan modal BMT terdiri dari simpanan-simpanan. Neraca merupakan pertanggung jawaban dewan manajemen kepada anggota, secara keseluruhan neraca tersebut berguna bagi anggota dan pengurus, dewan pengawas, badan manajemen dan calon anggota.

Sedangkan dalam laporan keuangan pada koperasi syariah, laporan posisi keuangan (neraca) menyajikan informasi berkaitan dengan aktiva, kewajiban, investasi dan ekuitas. Penyajian pos aktiva dan kewajiban dalam neraca tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya⁶⁸. Neraca adalah laporan

⁶⁵ Nurul, Purnama, Novarini, Yosi, *Baitul Mal Wa Tanwil*” Sebuah Tinjauan Teoritis”, hlm, 170

⁶⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi*”Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah” hlm , 338

keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva, jumlah kewajiban dan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu⁶⁹.

Dari beberapa keterangan di atas dan analisis penyajian laporan keuangan BMT Prima, bahwasanya laporan keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca) belum menerapkan standar akuntansi dengan mengacu pada PSAK No 27 tentang akuntansi perkoperasian serta juga belum mengacu pada PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dimana laporan belum memenuhi komponen-komponen yang diatur oleh standar akuntansi yang berlaku secara umum. Didalam laporan keuangan yang disajikan hanya terdapat dua laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan Laba/rugi saja, padahal standar akuntansi perkoperasian laporan yang disajikan terdiri dari 4 komponen, sedangkan perbankan syariah tujuh komponen.

Laporan laba/rugi yang disajikan oleh BMT Prima, adalah laporan perhitungan hasil usaha yang telah sesuai dengan standar PSAK No 27, akan tetapi penyajian laporan keuangan tersebut adalah berbasis kas, sedangkan dalam penyusunan laporan laba rugi dengan standar PSAK No 101 dan standar yang berlaku secara umum, penyusunan/pencatatan laba /rugi didasarkan pada pendapatan dan biaya yang diakui secara berbasis aktual sedangkan dalam perhitungan distribusi pendapatan atau hasil menggunakan dasar kas basis⁷⁰.

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang diakui dan dikenal secara luas. Dalam paragraf 25 PSAK No 1 tentang penyajian laporan keuangan dijelaskan

⁶⁷ Ibid , hlm 35

⁶⁸ Ibid, hlm, 179

bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Kegiatan akuntansi berbasis akrual akan menghasilkan laporan keuangan yang menjadi objek dalam pengujian kualitas laporan keuangan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, perusahaan akan mengakui dan mencatat hak dan kewajiban ekonominya tanpa mempertimbangkan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Beban harus diakui dan dicatat bila sudah menjadi kewajiban meskipun belum ada pengeluaran kas. Demikian juga terkait dengan pendapatan, pendapatan akan diakui dan dicatat jika sudah menjadi hak perusahaan meskipun belum ada penerimaan kas.⁷¹

Dari data yang kami peroleh, laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Prima sudah sesuai dengan syarat minimal laporan keuangan yaitu terdiri dari Pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha, laba atau rugi dari aktifitas normal, dan laba atau rugi bersih periode berjalan. Akan tetapi dalam laporan keuangan tersebut belum menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan secara wajar. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa BMT Prima belum benar-benar menerapkan standar yang berlaku tentang akuntansi perkoperasian.

Lembaga Keuangan Syariah dan juga Bank Syariah harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Metode langsung, dengan metode ini pengungkapan kas dikelompokkan utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.
- b. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas,

⁶⁹ Winwin, Mubarak, *Kualitas Pelaporan Keuangan “Kajian Teoritis dan Empiris”* (2017, 34)

penanggungan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasdimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan⁷².

Dari keterangan diatas, BMT Prima telah menerapkan standar PSAK yang berlaku secara umum akan tetapi menggunakan metode tidak langsung, dimana posisi kas hanya menampilkan jumlah kas yang dimiliki oleh BMT. Pada prinsipnya LKS dan Bank Syariah dianjurkan menggunakan metode langsung yang berguna untuk mengestiasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode langsung. Bagi hasil atau margin keuntungan yang dibayar dan yang diterima biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba, SHU yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan.

Jika dilihat menurut badan hukum yang memayungi BMT Prima, BMT telah menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No.27, karena pada PSAK No. 27 tidak terdapat komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat, akan tetapi mengingat kegiatan usahanya yang bergerak pada prinsip syariah, maka sebagai Entitas syariah BMT Prima dianjurkan untuk menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan dana zakat berasal dari wajib zakat dan pengguna zakat melalui badan amil zakat, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan dana zakat serta saldo awal dan akhir dana zakat.

⁷² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi "Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah"* hlm, 385

Jadi dengan adanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat BMT Prima bisa mengetahui berapa jumlah zakat yang terkumpul dan berapa jumlah zakat yang akan dibagikan kepada delapan asnaf. BMT Prima belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan juga keterbatasan dalam memperoleh data, hal ini menyebabkan tidak dapat diketahui berapa kenaikan atau penurunan saldo dana zakat, dan berapa saldo awal dan saldo akhir dana zakat dalam satu periode.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT Prima, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan BMT Prima belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 27 tentang koperasi dan PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, hal ini dapat dilihat dari:

1. Laporan keuangan BMT mengacu pada standar PSAK No. 27 tentang perkoperasian karena BMT Prima berbadan hukum koperasi. Sehingga laporan keuangan BMT akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS yaitu memuat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Akan tetapi BMT prima belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 27 yang berlaku secara umum. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang diperoleh dari hasil penelitian belum menampilkan laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dimana laporan ini adalah komponen penting yang harus disajikan oleh Lembaga Entitas Syariah berdasarkan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menerima zakat, infaq, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
2. Meskipun BMT berbadan hukum koperasi, tetapi dalam operasionalnya menjalankan bisnis keuangan syariah sesuai dengan fungsi BMT sebagai Lembaga Ekonomi, maka untuk pencatatan dan penyajian akutansinya

dianjurkan menggunakan standar PSAK yang berlaku untuk Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah yaitu PSAK 101. PSAK No. 101 menggambarkan operasional perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip syariah. laporan keuangan tersebut mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan dana investasi tidak terikat, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. BMT Prima hanya membuat dua laporan keuangan, sedangkan menurut PSAK No. 27 yang dijadikan acuan dalam penyajian laporan keuangan terdapat 4 jenis, dimana BMT hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba Rugi sedangkan laporan arus kas dan perubahan ekuitas tidak disajikan secara terpisah, sedangkan pada PSAK No. 101 ada tujuh jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga keuangan syariah, dimana dari ketujuh jenis laporan keuangan BMT hanya memenuhi dua jenis laporan keuangan. Laporan tersebut terdiri dari laporan neraca dan laporan hasil usaha / laba rugi, tidak terdapat laporan perubahan ekuitas, arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.
4. Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Prima, dimana pihak BMT tidak melakukan pemisahan pos-pos pada laporan laba rugi, pada pos pendapatan tidak dilakukan pemisahan / penggolongan pos piutang dengan pembiayaan, sehingga sulit untuk membedakan mana pendapatan dari sektor jual beli dan sektor sewa, hal ini dapat berpengaruh pada saat

pengambilan keputusan. Pada pos biaya/beban juga tidak dibuat penggolongan antara beban operasi, biaya di luar operasional. Sedangkan dalam PSAK No 27 atau PSAK No 101 hal tersebut tetap dilakukan guna menghindari kesalahpahaman.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BMT Prima, yaitu mengingat bahwa BMT Prima merupakan BMT yang seluruh aktivitasnya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai bagi hasil (syariah), maka diharapkan BMT dapat memilih untuk berbadan hukum KJKS sehingga dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini BMT dapat menggunakan standar PSAK No. 101 tentang penyajian akutansi perbankan syariah, untuk mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode.

Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan, BMT dapat menyesuaikan dengan akun-akun yang berlaku pada standar akutansi perbankan syariah, yaitu membuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan . Dalam penyajian laporan keuangan BMT juga diharapkan untuk mengelompokkan akun-akun yang ada sesuai dengan fungsi dan kinerjanya agar lebih mudah dalam menentukan kebijakan demi kemajuan BMT itu sendiri.

jika dilihat pada legalitas hukum sebagai lembaga yang dibawah binaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, maka berdasarkan peraturan

Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah pada NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akutansi umum akutansi koperasi sektor rill pada pasal 3 ayat 1 bahwasanya Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu diharapkan BMT Prima sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dapat menerapkan standar penyajian akutansi yang berlaku secara umum sesuai dengan peraturan kementerian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djayuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Amdayani, Melda “ Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 31 dan SAK ETAP pada BPR di Kota Padang”. thesis, Fakultas Ekonomi. 2008, (<http://repository.unand.ac.id/id/eprint/13871>), diakses tanggal 30 juli 2017
- Andrey Hasiholan Pulungan, Ahmad Basid Hasibuan, Luciana Haryono, *Akutansi Keuangan Dasar”Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012”*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Andri, Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, jakarta: Kencana prenada media group, 2017
- Ariantini, Ni Luh Gede. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, <http://ejournal.undiksha.ac.id/> diakses 8 Februari 2015.
- Burhan Bungin,*Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Bustamam, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh, skripsi Universitas Syiah Kuala, 2015
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi” Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015

- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Kautsar, Riza salman, *Akutansi Perbankan Syariah”Berbasis PSAK Syariah”*, Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta, 2017
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004),
- Muzayyidatul Habibah (2016) “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati Sekolah Tinggi Agama Islam
- Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2/per/M.KUKM/X/2007 Tentang : *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syarih Koperasi*, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007
- Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 12/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang : *Pedoman Umum Akutansi Koperasi Sektor Riil* Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2015
- Nabilah Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah(studi kasus pada bmt muda dan kjks bmt amanah ummah di surabaya Universita Airlangga Surabaya <http://www.ejournalunair.ac.id> diakses 9 februari 2017.
- Najmudin. *Manajemen Keuangan dan dan Aktualisasi Syari’iyah Modern* .(Yogyakarta; Andi, 2011).

- Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil* "Sebuah Kajian Teoritis" (Penerbit Amzah: Jakarta, 2016).
- Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Graha Ayu: Yogyakarta, 2012).
- Pratiwi, Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Suisan Manado. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://www.ejournalunsrat.ac.id> diakses 9 Februari 2016.
- R.Sanjaya Silalahi "Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru". *Skripsi Riau* : UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2010),
- Setiady, Marr. Telaah Kesiapan Dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha
- Singal, R.A, Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multiguna Abadi. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://www.ejournalunsrat.ac.id> diakses 9 Februari 2017.
- Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba empat , 2017
- Suheria Yanti "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau), 2015, (<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/>), diakses 30 juli 2017

UMKM Garmen Dipusat Grosir Suarabaya. Jurnal Berkala Ilmia Mahasiswa Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala. <http://journal.wima.ac.id/> diakses 10 agustus 2017.

Wiiwin Yadiati, Abdulloh Mubarok, *Kualitas Pelaporan Keuangan”Kajian Teoritis dan Empiris”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group:, 2017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

ALAMAT: JALAN PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS 30126 KOTAK POS: 54 TELP.(0711)354668 PALEMBANG

Formulir D.2

al : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

ssalamu'alaikum Wr. Wb

engau ini kami menyatakan bahwa mahasiswi :

ama : Ma'rifatul Aisyah
IM/Program Studi : 12190115/Ekonomi Islam
idul Skripsi : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Prima di Lubuk Seberuk Ogan Komering Ilir

elah selesai menyelesaikan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan tunjuk dari para penguji. Selanjutnya kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk enjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

emikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, Maret 2018

nguji Utama

Yuni Yusnita, S.Ag.M.H.I
IP. 197409242007012016

Penguji Kedua

Lidia Desiana, SE., M.SI
NIK. 1605061771



Wassalam,
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Hafidhatusholikhah, M.Ag
IP. 197509282006042001

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Ma'rifatul Aisyah
 Nim : 12190115
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Penyajian laporan keuangan pada BMT Prima di
 Lubuk Seberuk OKI
 Pembimbing I : Dedy Anwar.S.E.M,Si

No.	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	10 / 2016 /10	- Perbaiki judul - Tambahkan Materi	
2	17 / 2017 10/10	- Acc Judul - Perbaiki bab 1-3 - Tambahkan materi	
3	09 / 2017 /02	- Acc bab 1-3 - Lanjut bab 4	
4	03 / 2017 /07	- Acc bab 4 - Lanjut bab 5	
5	04 / 2017 /10	Acc BAB I - V sup untuk di uji	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Ma'rifatul Aisyah
 Nim : 12190115
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada BMT Prima
 di Lubuk Seberuk OKI
 Pembimbing I : Syamsiar Zahrani, M.A

NO	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf
1	24/07 2016	Perbaiki tulisan, Penjelasan bahasa sesuai dengan saran yg diberikan Perbaiki Judul	
2	19/08 2016	ACC judul Perbaiki bab 1-3 Perbaiki tulisan	
3	28/08 2016	ACC bab 1-3 Perbaiki tulisan, tambahkan materi lanjut bab 4	
4	20/09 2016	ACC bab 4. Lanjut bab 5 Perbaiki kesimpulan	
5	18/04 2017	Ace lanjut dgn kuyile	